

Bagian VIIIb

**FAKULTAS
HUKUM**

Daftar / si

● PENDAHULUAN	VIIIb.1.1
● VISI, MISI dan TUJUAN	VIIIb.2.1
● PROGRAM PENDIDIKAN	VIIIb.3.1
● FASILITAS	VIIIb.4.1
● STRUKTUR ORGANISASI dan PERSONALIA	VIIIb.5.1
● TENAGA KEPENDIDIKAN	VIIIb.6.1

PENDAHULUAN

Sejak masih bernama Universitas TRISAKTI pada tahun 1966, Fakultas Hukum merupakan salah satu dari tiga fakultas (farmasi, hukum dan ekonomi) yang dimiliki UBAYA. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 172/PT/III/1968, tanggal 5 September 1968, Program Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UBAYA berstatus **Terdaftar**.

Fakultas Hukum UBAYA telah meniti waktu demi waktu dengan semangat dan tekad bulat mewujudkan tujuan yang digariskan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) 1976 – 1983, yaitu menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan analitis, keahlian dan ketrampilan di bidang hukum, berkepribadian baik serta berpartisipasi dalam era pembangunan. Dengan diterbitkannya Pola Umum Pengembangan Jangka Panjang UBAYA 1984, sebagai pengganti RIP 1976 – 1983, Fakultas Hukum UBAYA melakukan pemantapan di bidang kurikulum. Sejalan dengan itu, pada tahun akademik 1982 – 1983 penyelenggaraan pendidikan hukum di Fakultas Hukum UBAYA dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.

Pada tanggal 18 Februari 1985, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 071/O/1985, Fakultas Hukum UBAYA memperoleh status **Diakui**. Selanjutnya, pada tanggal 8 September 1986, dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0611/O/1986, Fakultas Hukum UBAYA memperoleh status akreditasi **Disamakan** untuk 6 jurusan, yakni :

- Jurusan Hukum Perdata
- Jurusan Hukum Pidana
- Jurusan Hukum Administrasi Negara
- Jurusan Hukum Tata Negara
- Jurusan Hukum Internasional
- Jurusan Hukum Acara

Dengan status akreditasi tersebut, Fakultas Hukum UBAYA dipercaya pemerintah untuk menyelenggarakan ujian negara sendiri yang terintegrasi dalam Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Pada tahun 1993, program pendidikan tinggi ilmu hukum mengalami reorientasi pendidikan yang dilaksanakan secara mono-program, menjadi program studi ilmu hukum. Bersama dengan itu pula diberlakukan Kurikulum Nasional (KURNAS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0325/U/1994. Pada tahun akademik 1994 – 1995 Fakultas Hukum UBAYA mulai berkiprah sekaligus memantapkan cita-cita sebagaimana digariskan dalam **Pola Orientasi Pengembangan**, yang berorientasi pada masyarakat Bisnis-Industri, dengan muatan kurikulum yang mengarah pada Business Law.

Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 326/U/1994 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, telah dilakukan reformasi pendidikan dengan melaksanakan kembali penilaian akreditasi bagi program studi-program studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang berstatus **Disamakan**. Tiga program studi di UBAYA, diantaranya **ilmu hukum** dinilai pada akreditasi tahap pertama pada tahun 1996 – 1997. Melalui surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/BAN-PT/Ak.I/ VIII/1998, tanggal 11 Agustus 1998, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA memperoleh peringkat akreditasi A dan mendapat kepercayaan membina program studi sejenis. Peringkat tersebut berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Pada tahun 2003 telah dilakukan akreditasi yang kedua oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Fakultas Hukum UBAYA. Keputusan BAN PT Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 012/BAN-PT/ Ak-VII/S1/VII/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana Strata-1 di Perguruan Tinggi, memutuskan dan menetapkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA kembali memperoleh peringkat akreditasi A.

Pada tahun 2011 telah dilakukan akreditasi yang ketiga oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Fakultas Hukum UBAYA. Keputusan BAN-PT Nomor 025/BAN-PT/Ak-XIV/ IX/ 2011 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi, memutuskan dan menetapkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA memperoleh peringkat akreditasi B.

Pada tahun 2015 telah dilakukan akreditasi yang keempat oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Fakultas Hukum UBAYA. Keputusan BAN-PT Nomor 1257/SK/BAN-PT/Akred/ S/XII/2015 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi, memutuskan dan menetapkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA memperoleh peringkat akreditasi B.

Namun demikian setelah dilakukan *surveilance* pada tahun 2016, berdasarkan keputusan BAN-PT No. 1141/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2016, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya dinyatakan terakreditasi dengan peringkat A. Surat keputusan tersebut berlaku sejak 19 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2020. dan berhasil dipertahankan berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 665/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 dengan akreditasi A yang 20 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2025.

Perolehan peringkat akreditasi tersebut layak diperhitungkan dalam pengembangan akademis lebih lanjut sebagai suatu tantangan, karena akreditasi merupakan pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi tersebut dalam memenuhi standar kualifikasi tertentu, sehingga lulusannya diharapkan mampu memperoleh kepercayaan pengguna jasa untuk menjalankan praktik profesinya, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

VISI, MISI dan TUJUAN

Visi : Menjadi Fakultas Hukum yang Berkualitas untuk Memenuhi Kebutuhan Hukum bagi Masyarakat.

Makna :

Menjadi Fakultas yang memperoleh apresiasi yang tinggi dari masyarakat karena memiliki kualitas keilmuan dan penerapan di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki kualitas layanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat
3. Mendorong terwujudnya komunitas fakultas hukum untuk mampu berperan aktif di tingkat nasional dan internasional

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam era global
2. Membentuk dan mengembangkan jejaring kerjasama di bidang penelitian dan layanan hukum

PROGRAM PENDIDIKAN

1. Kurikulum

Secara historis Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum UBAYA mengalami beberapa perubahan sesuai kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan Pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045 Tahun 2002, Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 1999 telah ditinjau kembali dan disempurnakan serta disahkan menjadi kurikulum Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2004 yang secara efektif telah berlaku terhitung mulai semester gasal tahun akademik 2004-2005 dan seterusnya. Pada tahun 2017, dimulai kurikulum yang disebut dengan kurikulum 2017 yang diarahkan untuk mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang memuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah globalisasi, Kurikulum Fakultas Hukum pun dikembangkan membentuk lulusan yang mampu menjawab kebutuhan hukum di masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagaimana arahan Pemerintah Republik Indonesia bahwa pendidikan tinggi nasional harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (PERPRES RI No. 8 Tahun 2012 dan PERMENDIKBUD RI No. 73 Tahun 2013) dan Standar Pendidikan Tinggi Nasional yang memuat pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka/MBKM (PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020) maka Kurikulum Fakultas Hukum untuk program Sarjana diperbaharui menjadi Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Tahun 2021.

Mata kuliah-mata kuliah di Fakultas Hukum dapat dikelompokkan menjadi

1. Kelompok Mata kuliah wajib Fakultas
2. Kelompok Mata Kuliah Program peminatan:
 - a. Peminatan Hukum Keperdataan
 - b. Peminatan Hukum Pidana
 - c. Peminatan Hukum administrasi Negara
 - d. Peminatan Hukum Internasional
 - e. Peminatan Hukum Tata Negara

2. Pelaksanaan Kurikulum

- ⊙ Mata kuliah disajikan berdasarkan alur tiap semester dengan memperhitungkan beberapa matakuliah yang tetap disajikan sepanjang semester, seperti: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Filsafat Hukum, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Penalaran Hukum, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan tetap memperhatikan persyaratan minimal dibukanya kelas sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Universitas.
- ⊙ Semua mata kuliah yang pernah ditempuh, dihargai dengan sejumlah satuan kredit semester (sks)
- ⊙ Pengambilan mata kuliah harus memperhatikan alur prasyarat mata kuliah (Tabel 3 & 4)
- ⊙ Pengambilan ulang mata kuliah yang telah dievaluasi diperkenankan, dengan catatan pengulangan untuk mata kuliah dengan nilai $\geq C$ yang akan diperhitungan adalah hasil nilai akhir/terbaru
- ⊙ Mahasiswa yang telah mengumpulkan ≥ 100 sks dengan nilai minimal D dapat mengajukan permohonan Program Peminatan (Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, dan Hukum Internasional) sesuai dengan minat dan bakatnya kepada Dekan c.q. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
- ⊙ Penyusunan skripsi dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh 117 sks, lulus Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum $\geq C$, minimal 2 mata kuliah program peminatan, dan memenuhi persyaratan TOEFL ≥ 400 dengan mengajukan permohonan kepada Dekan c.q. Wakil Dekan I.
- ⊙ Untuk mata kuliah program peminatan, mahasiswa wajib mengambil 14 sks dengan ketentuan sebagai berikut: 10 sks wajib dari mata kuliah di program peminatannya, sedangkan 4 sks diambil dari mata kuliah pada program peminatan lainnya yang akan menunjang skripsi (penulisan hukum).

3. Prasyarat dan Alur Mata Kuliah

Sejalan dengan upaya mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas maka proses pembelajaran dan penyajian mata kuliah perlu ditetapkan prasyarat dan alur mata kuliah sebagaimana terurai dalam Tabel 3 dan 4.

4. Syarat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan telah berhasil menyelesaikan Program Sarjana Hukum, apabila memenuhi syarat-syarat:

- telah mengumpulkan ≥ 153 sks serta jumlah nilai minimal D $\geq 20\%$ dari total mata kuliah yang telah diambil sebagai syarat lulus.
- IP Kumulatif $\geq 2,00$
- tidak ada nilai E
- Nilai-nilai $\geq C$ untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, dan Skripsi/ Tugas Akhir
- nilai D maksimal 20% dari 153 sks = 31 sks

Tabel 1

**MATA KULIAH PRASYARAT KURIKULUM 2021
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

Mata kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang harus ditempuh terlebih dahulu dengan nilai minimal sebelum menempuh mata kuliah tertentu. Beberapa mata kuliah ditentukan mata kuliah prasyarat haruslah sudah ditempuh dengan nilai minimal C yang menunjukkan kompetensi minimal mahasiswa.

Contoh: Hukum Perdata adalah mata kuliah prasyarat bagi Hukum Acara Perdata, mahasiswa harus terlebih dahulu menempuh mata kuliah Hukum Perdata dengan nilai minimal tertentu. (Perhatikan Tabel berikut ini)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT	SKS
I. KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN					
1	1000C001	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	3	-	
2	1000C01X	PENDIDIKAN AGAMA: - ISLAM - KRISTEN PROTESTAN - KRISTEN KATOLIK - HINDU - BUDHA - KONG HU CU	3	-	
3	1000C101	MANUSIA DAN PENGEMBANGAN DIRI	3	-	
4	1000C102	LITERASI DIGITAL	2	-	
5	1201A046	BAHASA INDONESIA AKADEMIK	2	-	
II. KELOMPOK MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN					
6	1201A001	PENGANTAR ILMU HUKUM	4		
7	1201A002	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4		
8	1201A003	ILMU NEGARA	4		
9	1201A004	HUKUM PERDATA	4	PENGANTAR ILMU HUKUM PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4 4
10	1201A005	HUKUM PIDANA	4	PENGANTAR ILMU HUKUM PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4 4
11	1201A009	HUKUM TATA NEGARA	4	ILMU NEGARA	4
12	1201A006	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4	ILMU NEGARA	4
13	1201A011	HUKUM DAGANG	3	HUKUM PERDATA	4
14	1201A007	HUKUM ADAT	2		
15	1201A015	HUKUM ISLAM	2		
16	1201A008	HUKUM INTERNASIONAL	4	PENGANTAR ILMU HUKUM PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4 4
17	1201A012	HUKUM AGRARIA/TANAH	4	HUKUM ADAT	2
18	1201A014	HUKUM ACARA PERDATA	3	HUKUM PERDATA	4
19	1201A010	HUKUM ACARA PIDANA	3	HUKUM PIDANA	4
20	1201A031	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4

21	1201A037	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2	HUKUM TATA NEGARA	4
22	1201A034	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	HUKUM PERDATA	4
				HUKUM PIDANA	4
				HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4
				HUKUM TATA NEGARA	4
				HUKUM INTERNASIONAL	4
III. KELOMPOK MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA					
23	1201A043	PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH) KEAHLIAN LITIGASI: PRAKTIK PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA PRAKTIK PERADILAN HUKUM ACARA PIDANA PRAKTIK PERADILAN HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA KEAHLIAN NON LITIGASI: PRAKTIK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRAKTIK MEDIASI DI PENGADILAN PRAKTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PRAKTIK PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK PRAKTIK NEGOSIASI DAN ARBITRASE	6	KETERANGAN: SYARAT PENGAMBILAN MATAKULIAH PLKH ADALAH TELAH MENEMPUH SEMUA MATA KULIAH DI BAWAH INI DENGAN NILAI MINIMAL $\geq D$, YAITU: 1. HUKUM ACARA PERDATA, 2. HUKUM ACARA PIDANA, 3. HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, 4. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI, 5. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6. MINIMAL 2 MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN	
24	1201A045	SKRIPSI/TUGAS AKHIR	6	KETERANGAN: PENGAJUAN PROPOSAL SKRIPSI/TUGAS AKHIR ADALAH 1. TELAH MENEMPUH ≥ 117 SKS, TERMASUK MATA KULIAH METODE PENELITIAN HUKUM DENGAN NILAI $\geq C$ 2. MINIMAL 2 MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN	
IV. KELOMPOK MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA					
25	1201A042	FILSAFAT HUKUM	4	PENGANTAR ILMU HUKUM	4
V. KELOMPOK MATA KULIAH KEHIDUPAN BERSAMA					
26	1201A027	HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	2	HUKUM PERDATA	4
				HUKUM PIDANA	4
				HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4
				HUKUM TATA NEGARA	4
27	1201A022	HAK ASASI MANUSIA	2	HUKUM TATA NEGARA	4
VI. KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB UMUM					
28	1000C201	COMMUNICATIVE ENGLISH	2	-	
29	1000C002	KEWIRAUSAHAAN& INOVASI	3	KETERANGAN:: TELAH MENEMPUH MINIMAL ? 80 SKS	
30	1201A041	METODE PENELITIAN HUKUM	2	BAHASA INDONESIA	2
				HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	2

31	1201A038	HUKUM LINGKUNGAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4
32	1201A025	NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI	2	HUKUM TATA NEGARA	4
33	1201A035	PEMERINTAHAN DAERAH	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM TATA NEGARA	4 4
34	1201A030	ORGANISASI INTERNASIONAL	2	HUKUM INTERNASIONAL	4
35	1201A021	HUKUM LAUT	2	HUKUM INTERNASIONAL	4
36	1201A026	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI	2	HUKUM PIDANA	4
37	1201A040	PENALARAN HUKUM	2	HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM TATA NEGARA	4 4 4 4
38	1201A028	HUKUM KEWARGANEGARAAN	2	HUKUM TATA NEGARA	4
39	1201A016	HUKUM PERIKATAN	3	HUKUM PERDATA	4
40	1201A013	HUKUM PAJAK	3	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4
41	1201A019	HUKUM PERSEKUTUAN	2	HUKUM DAGANG	3
42	1201A023	HUKUM PERIZINAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4
43	1201A017	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	2	HUKUM PERDATA	4
44	1201A020	HUKUM PERBURUHAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4
45	1201A033	KEJAHATAN EKONOMI	2	HUKUM PIDANA	4
46	1201A036	HUKUM PENANAMAN MODAL	2	HUKUM PERDATA	4
47	1201A039	HAK MILIK INTELEKTUAL	2	HUKUM DAGANG	3
48	1201A018	HUKUM ASURANSI	2	HUKUM DAGANG	3
49	1201A029	HUKUM JAMINAN	2	HUKUM PERIKATAN	3
50	1201A032	HUKUM PENGANGKUTAN	3	HUKUM DAGANG	3
51	1201A024	HUKUM PERBANKAN	2	HUKUM PERDATA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4 4

VII. KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN

PROGRAM PEMINATAN KEPERDATAAN

52	1201A101	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN : TELAH MENEMPUH ≥ 100 SKS DENGAN NILAI MINIMAL $\geq D$
53	1201A102	HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	2	
54	1201A103	TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL	2	
55	1201A104	HUKUM KEPAILITAN	2	
56	1201 A105	HUKUM PASAR MODAL	2	
57	1201 A106	HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA	2	
58	1201 A107	ARBITRASE PERDAGANGAN INTERNASIONAL	2	

PROGRAM PEMINATAN PIDANA

59	1201A108	KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH ≥ 100 SKS DENGAN NILAI MINIMAL $\geq D$
60	1201A109	HUKUM PENITENSIER	2	
61	1201A110	KEJAHATAN KORPORASI	2	
62	1201 A111	KEJAHATAN SIBER	2	
63	1201 A112	HUKUM FORENSIK	2	
64	1201 A113	KEJAHATAN TRANSNASIONAL	2	
65	1201 A114	SISTEM PERADILAN ANAK DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	2	

PROGRAM PEMINATAN ADMINISTRASI NEGARA				
66	1201 A115	HUKUM KEUANGAN NEGARA	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH \geq 100 SKS DENGAN NILAI MINIMAL \geq D
67	1201 A116	HUKUM KESEHATAN	2	
68	1201 A117	HUKUM TATA RUANG	2	
69	1201 A118	HUKUM KEPEGAWAIAN	2	
70	1201 A119	HUKUM PELAYANAN PUBLIK	2	
71	1201 A120	HUKUM RUMAH SUSUN/KONDOMINIUM	2	
72	1201 A121	HUKUM KEIMIGRASIAN DAN KEPABEANAN	2	
PROGRAM PEMINATAN INTERNASIONAL				
73	1201 A122	HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH \geq 100 SKS DENGAN NILAI MINIMAL \geq D
74	1201 A123	HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	2	
75	1201 A124	HUKUM HUMANITER	2	
76	1201 A125	HUKUM PERADILAN INTERNASIONAL	2	
77	1201 A126	HUKUM UDARA DAN ANGKASA	2	
78	1201 A127	HUKUM EKSTRADISI	2	
79	1201 A128	HUKUM PENGUNGS	2	
PROGRAM PEMINATAN KETATANEGARAAN				
80	1201 A129	KEPARTAIAN & ORGANISASI MASYARAKAT	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH \geq 100 SKS DENGAN NILAI MINIMAL \geq D
81	1201 A130	KEKUASAAN YUDISIIL	2	
82	1201 A131	HUKUM PEMILIHAN UMUM	2	
83	1201 A132	HUKUM KONSTITUSI	2	
84	1201 A133	PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA	2	
85	1201 A134	KELEMBAGAAN NEGARA	2	
86	1201 A135	PERLINDUNGAN HAK BAGI KELOMPOK MINORITAS	2	

Tabel 2

**MATA KULIAH FAKULTAS HUKUM PROGRAM SARJANA
KURIKULUM 2021**

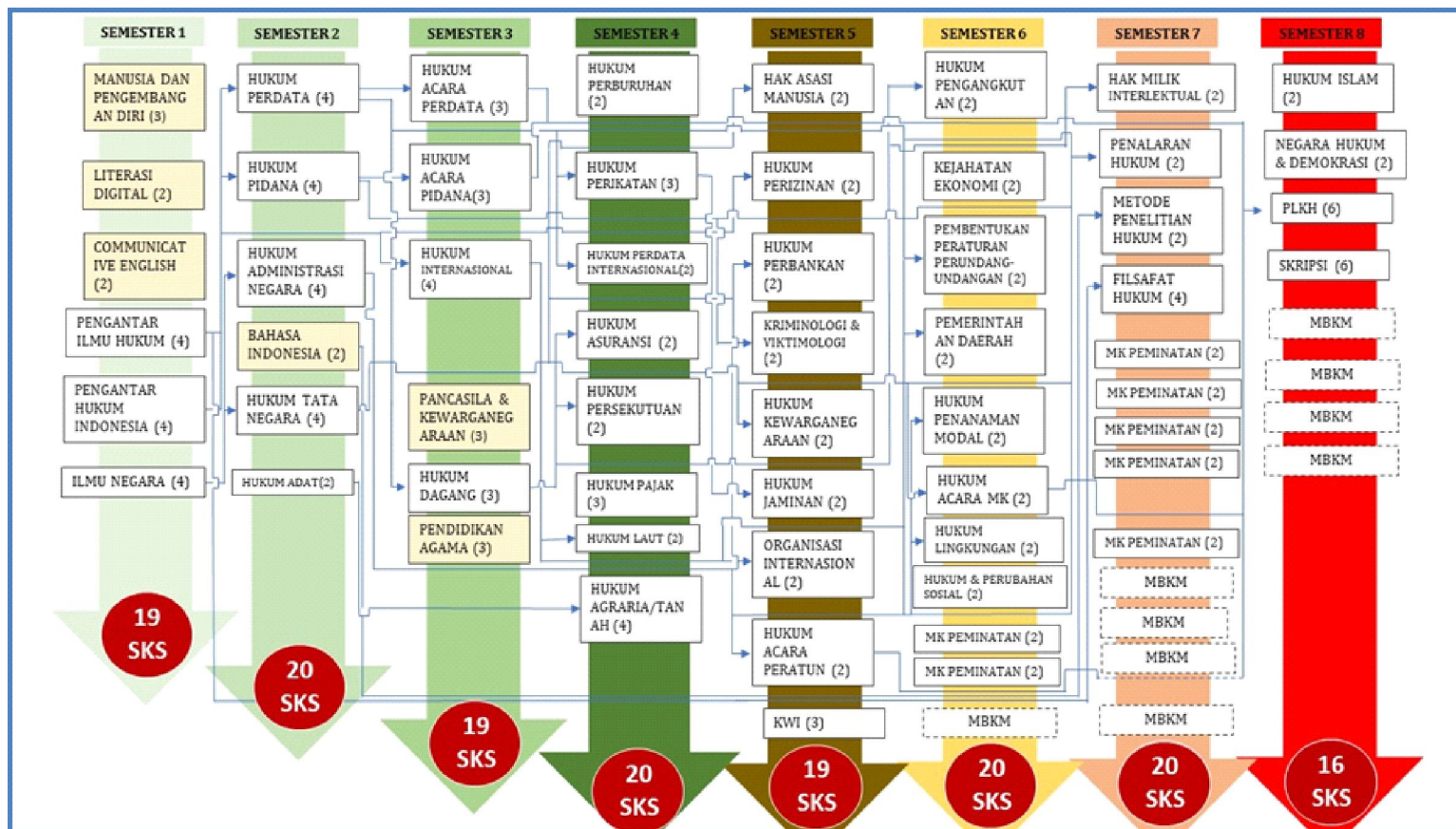
SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT	SKS
I	1000C101	MANUSIA DAN PENGEMBANGAN DIRI	3	-	
	1000C102	LITERASI DIGITAL	2	-	
	1000C201	COMMUNICATIVE ENGLISH	2	-	
	1201A001	PENGANTAR ILMU HUKUM	4	-	
	1201A002	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4	-	
	1201A003	ILMU NEGARA	4	-	
TOTAL			19		
II	1201A004	HUKUM PERDATA	4	PENGANTAR ILMU HUKUM PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4 4
	1201A005	HUKUM PIDANA	4	PENGANTAR ILMU HUKUM PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4 4
	1201A006	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4	PENGANTAR ILMU HUKUM PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4 4
	1201A046	BAHASA INDONESIA	2	-	-
	1201A009	HUKUM TATA NEGARA	4	ILMU NEGARA	4
	1201A007	HUKUM ADAT	2	-	-
TOTAL			20		
III	1201A010	HUKUM ACARA PIDANA	3	HUKUM PIDANA	4
	1201A014	HUKUM ACARA PERDATA	3	HUKUM PERDATA	4
	1201A008	HUKUM INTERNASIONAL	4	-	-
	1000C001	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	3	-	
	1201A011	HUKUM DAGANG	3	HUKUM PERDATA	4
					-
	1000C01X	PENDIDIKAN AGAMA A. ISLAM B. KRISTEN PROTESTAN C. KRISTEN KATOLIK D. HINDU E. BUDHA F. KONG HU CU	3	-	-
TOTAL			19		
IV					
	1201A016	HUKUM PERIKATAN	3	HUKUM PERDATA	4
	1201A017	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	2	HUKUM PERDATA	4
	1201A018	HUKUM ASURANSI	2	HUKUM DAGANG	3
	1201A019	HUKUM PERSEKUTUAN	2	HUKUM DAGANG	3
	1201A020	HUKUM PERBURUHAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4
	1201A021	HUKUM LAUT	2	HUKUM INTERNASIONAL	4
	1201A013	HUKUM PAJAK	3	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4
	1201A102	HUKUM AGRARIA/TANAH	4	HUKUM ADAT	2
TOTAL			20		

V	1201A022	HAK ASASI MANUSIA	2	HUKUM TATA NEGARA	4	
	1201A023	HUKUM PERIZINAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4	
	1201A024	HUKUM PERBANKAN	2	HUKUM PERDATA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4 4	
	1201A026	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI	2	HUKUM PIDANA	4	
	1201A028	HUKUM KEWARGANEGARAAN	2	-		
	1201A029	HUKUM JAMINAN	2	HUKUM PERIKATAN	3	
	1201A030	ORGANISASI INTERNASIONAL	2	HUKUM INTERNASIONAL	4	
	1201A031	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4	
	1000C002	KEWIRAUSAHAAN DAN INOVASI	3	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH INI ADALAH TELAH MENEMPUH ≥80 SKS		
TOTAL			19			
VI	1201A032	HUKUM PENGANGKUTAN	2	HUKUM DAGANG	3	
	1201A033	KEJAHATAN EKONOMI	2	HUKUM PIDANA	4	
	1201A034	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM TATA NEGARA HUKUM INTERNASIONAL	4 4 4 4 4	
	1201A035	PEMERINTAHAN DAERAH	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4	
	1201A036	HUKUM PENANAMAN MODAL	2	HUKUM PERDATA	4	
	1201A037	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2	HUKUM TATA NEGARA	4	
	1201A038	HUKUM LINGKUNGAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	4	
	1201A027	HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	2	-		
		MK PEMINATAN	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH ≥ 100 SKS DENGAN NILAI MINIMAL≥ D		
		MK PEMINATAN	2			
	TOTAL			18		
	VII	1201A039	HAK MILIK INTELEKTUAL	2	HUKUM DAGANG	3
1201A040		PENALARAN HUKUM	2	HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM TATA NEGARA	4 4 4 4	
1201A041		METODE PENELITIAN HUKUM	2	BAHASA INDONESIA AKADEMIK HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	2 2	
1201A042		FILSAFAT HUKUM	4	PENGANTAR ILMU HUKUM	4	
		MK PEMINATAN	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH ≥100 SKS DENGAN NILAI MINIMAL≥D		
		MK PEMINATAN	2			
		MK PEMINATAN	2			
		MK PEMINATAN	2			
	MK PEMINATAN	2				
TOTAL			20			

VIII	1201A105	HUKUM ISLAM	2	-	
	1201A025	NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI	2	-	
	1201A043	PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM	6	KETERANGAN: SYARAT TELAH MENEMPUIH SEMUA MATA KULIAH DI BAWAH INI DENGAN NILAI $\geq D$, YAITU: 1. HUKUM ACARA PERDATA; 2. HUKUM ACARA PIDANA; 3. HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA; 4. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MINIMAL 2 MK PROGRAM PEMINATAN	
	1201A045	SKRIPSI	6	KETERANGAN: PENGAJUAN PROPOSAL SKRIPSI/TUGAS AKHIR: 1. TELAH MENEMPUIH ≥ 117 SKS; 2. NILAI MK METODE PENELITIAN HUKUM $\geq C$; 3. MINIMAL 2 MK PROGRAM PEMINATAN	

Tabel 3
ALUR MATA KULIAH

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4	SEMESTER 5	SEMESTER 6	SEMESTER 7	SEMESTER 8
MANUSIA DAN PENGEMBANGAN DIRI (3)	HUKUM PERDATA (4)	HUKUM ACARA PIDANA (3)	HUKUM PERBURUHAN (2)	HAK ASASI MANUSIA (2)	HUKUM PENGANGKUTAN (2)	HAK MILIK INTELEKTUAL (2)	HUKUM ISLAM (2)
LITERASI DIGITAL (2)	HUKUM PIDANA (4)	HUKUM ACARA PERDATA (3)	HUKUM PERIKATAN (3)	HUKUM PERIZINAN (2)	KEJAHATAN EKONOMI (2)	PENALARAN HUKUM (2)	NEGARA HUKUM DAN DEMOKARASI (2)
COMMUNICATIVE ENGLISH (2)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (4)	HUKUM INTERNASIONAL (4)	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (2)	HUKUM PERBANKAN (2)	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (2)	METODE PENELITIAN HUKUM (2)	PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (6)
PENGANTAR ILMU HUKUM (4)	BAHASA INDONESIA (2)	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (3)	HUKUM ASURANSI (2)	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI (2)	PEMERINTAHAN DAERAH (2)	FILSAFAT HUKUM (4)	SKRIPSI (6)
PENGANTAR HUKUM INDONESIA (4)	HUKUM TATA NEGARA (4)	HUKUM DAGANG (3)	HUKUM PERSEKUTUAN (2)	HUKUM KEWARGANEGARAAN (2)	HUKUM PENANAMAN MODAL (2)	MK PEMINATAN (2)	
ILMU NEGARA (4)	HUKUM ADAT (2)	PENDIDIKAN AGAMA (3)	HUKUM PAJAK (3)	HUKUM JAMINAN (2)	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (2)	MK PEMINATAN (2)	
			HUKUM LAUT (2)	ORGANISASI INTERNASIONAL (2)	HUKUM LINGKUNGAN (2)	MK PEMINATAN (2)	
			HUKUM AGRARIA/TANAH (4)	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (2)	HUKUM & PERUBAHAN SOSIAL (2)	MK PEMINATAN (2)	
				KEWIRAUUSAHAAN DAN INOVASI (3)	MK PEMINATAN (2)	MK PEMINATAN (2)	
					MK PEMINATAN (2)		
					PILIHAN MBKM DENGAN BOBOT SKS SESUAI PENYETARAAN		



4. Pedoman Umum Penyusunan Skripsi

4.1 Pengertian

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan penelitian lapangan dan/atau kepustakaan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), sesuai dengan program kekhususannya.

4.2 Persyaratan pengajuan

Mahasiswa yang sudah mengumpulkan 117 sks diperkenankan mengajukan permohonan penulisan skripsi dan didahului dengan proposal skripsi yang diajukan kepada Ketua Laboratorium dan dilanjutkan dengan mekanisme pengajuan yang ditetapkan Fakultas.

4.3 Proposal Skripsi

Sebelum mahasiswa membuat skripsi terlebih dahulu mahasiswa harus membuat proposal skripsi, yang terdiri dari:

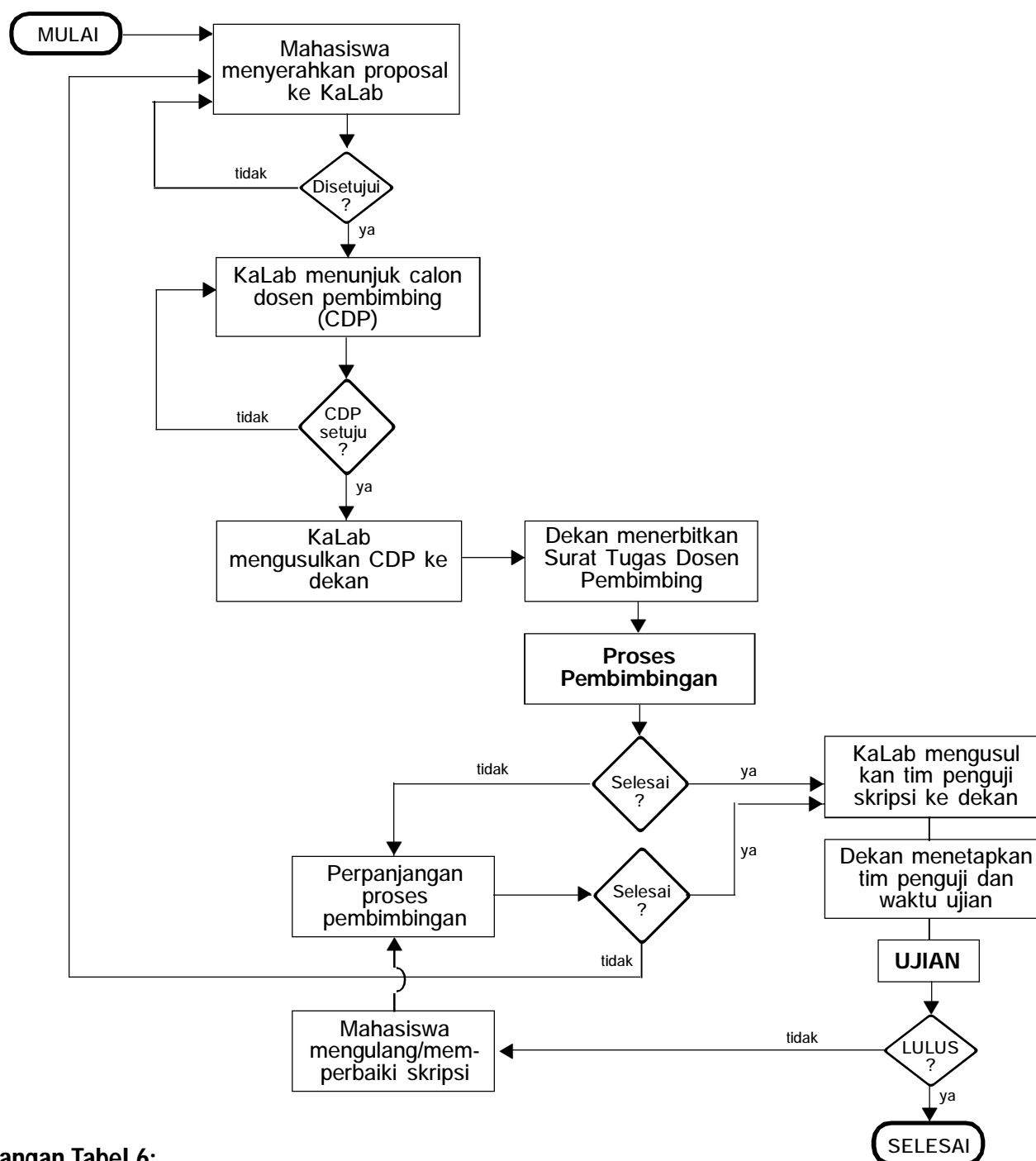
- Latar Belakang Masalah
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penulisan
- Metodologi
- Pertanggungjawaban Sistematika
- Bahan Bacaan Awal (minimal 5 buku)

4.4 Penulisan skripsi lebih lanjut mengikuti Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 183 Tahun 2018.

Untuk itu diperhatikan:

- Penulisan kutipan dengan format APA
- Penulisan daftar referensi dengan format APA

Tabel 4

ALUR dan TATA CARA PENYUSUNAN SKRIPSI**Keterangan Tabel 6:**

- ⊙ Bimbingan skripsi dilaksanakan selama jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Tugas bimbingan;
- ⊙ Bila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut di atas penyusunan skripsi belum selesai / siap untuk diuji, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan bimbingan selama 6 bulan;
- ⊙ Bila masa perpanjangan berakhir dan skripsi tetap belum selesai/siap diuji, maka penyusunan skripsi tersebut dinyatakan gugur .

FASILITAS

1. Laboratorium

Merupakan penunjang pelaksana (psikomotor) di bidang pendidikan akademik dan profesional yang meliputi kemampuan litigasi dan non-litigasi yang digunakan untuk praktik bagi mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.

2. Ruang Pengadilan Semu (Moot Court)

Merupakan tempat pelatihan praktik mahasiswa di bidang litigasi untuk semua jenis perkara serta praktik bagi peserta mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum untuk menjadi praktisi yang profesional.

3. Biro Bantuan Hukum (BBH)

Merupakan adalah satu kegiatan di bidang pengabdian masyarakat antara lain pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi masyarakat/pencari keadilan.

4. Pusat Kajian/Kelompok kajian

Merupakan unsur pelaksana dari laboratorium-laboratorium yang ada di Fakultas Hukum dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan akademik, antara lain kelompok Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Literasi Pancasila Hukum Tata Negara serta Pusat Kajian Standarisasi.

5. Kantor Layanan Hukum (KLH)

Wadah perwujudan University - Industry - linkages, yang kegiatannya meliputi:

- Konsultasi hukum bisnis, hukum perbankan, hukum perburuhan, hak kekayaan intelektual/hak cipta, paten, dan merek
- Pelatihan yang berkaitan dengan hukum bisnis
- Seminar dan Short Course
- Negosiasi, mediasi
- Litigasi di bidang: hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi/perburuhan

6. English Course

Kursus Bahasa Inggris setara TOEFL ini diselenggarakan oleh fakultas untuk para mahasiswa semester genap tahun ketiga agar mereka siap menerima perkuliahan yang disampaikan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Kursus ini bersifat wajib dengan passing grade ≥ 400 .

7. Koleksi Khusus

Merupakan perpustakaan fakultas yang berupa sarana penunjang pendidikan hukum, dalam bentuk literatur, artikel, jurnal, makalah, penelitian, dan peraturan perundang-undangan di bidang hukum.

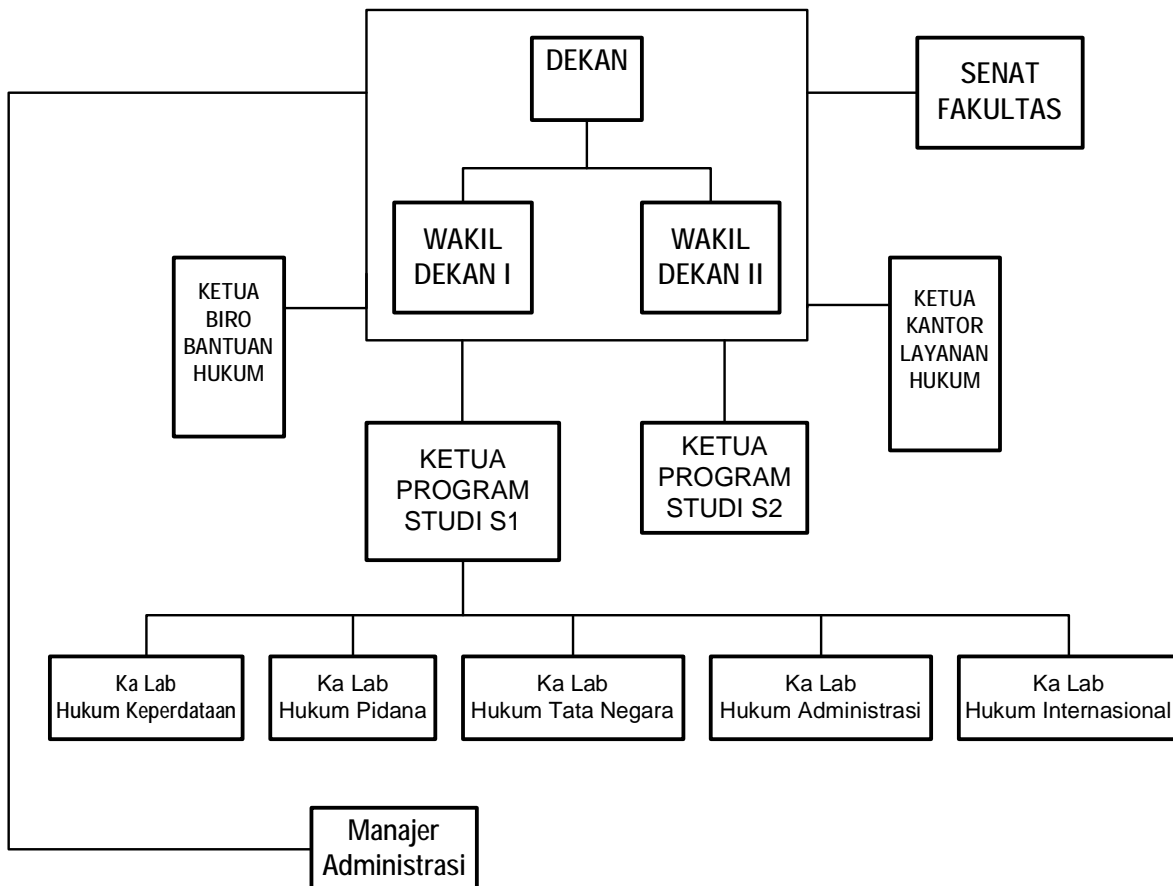
8. Media Hukum

Untuk menampung pemikiran ilmiah tentang hukum yang selalu berkembang bagi para akademisi dan ahli-ahli hukum lainnya, Fakultas Hukum Universitas Surabaya menerbitkan 3 (tiga) jurnal hukum, yaitu:

1. YUSTIKA: Media Hukum dan Keadilan (<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/index>),
2. JurnalMinuta (<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jmta>) dan
3. Jurnal Argumentum (<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/argu>)

STRUKTUR ORGANISASI dan PERSONALIA

1. Struktur Organisasi



2. Personalia

Dekan	: Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan I	: Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan II	: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	: Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	: Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
Ketua Laboratorium	
- Pjs Hukum Keperdataan	: Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
- Hukum Pidana	: Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.
- Hukum Tata Negara	: Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
- Hukum Administrasi	: Nabbilah Amir, S.H., M.H.
- Hukum Internasional	: Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., M.H.
Ketua Non Laboratorium	: Ex Officio Dekan Fakultas Hukum
Kepala Biro Bantuan Hukum	: Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.
Koordinator Kantor Layanan Hukum	: Ex Officio Dekan Fakultas Hukum
Manajer Administrasi	: Khomarul Alkarimah, S.E., M.M.

TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dosen Tetap

No.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1	195042	Prof.Dr.Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.	1. Hukum Pajak 2. Hukum Perdata Waris
2	191001	Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.	Organisasi Internasional
3	186018	Suhariwanto, S.H., M.Hum.	1. Hukum Perburuhan 2. Hukum Internasional
4	189019	Sriwati, S.H., M.Hum.	3. Hukum Agraria / Tanah
5	188003	TjondroTirtamulia, S.H., C.N., M.H.	1. Organisasi Internasional 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6	197025	Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.	1. Hukum Penanaman Modal 2. Hukum Kesehatan
7	189002	Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.	1. Hukum Kewarganegaraan 2. Pemerintahan Daerah
8	204023	Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.	1. Kejahatan Siber 2. Kejahatan Ekonomi (Tindak Pidana Pencucian Uang)
9	200059	Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.	Perjanjian Internasional
10	196008	Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.	1. Hak Milik Intelektual 2. Hukum Asuransi
11	197002	Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.	1. Viktimologi dan Kriminologi 2. Hukum Pidana
12	210035	Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.	1. Kapita Selecta Hukum Pidana (pornografi) 2. Kejahatan Korporasi
13	201019	Dr. Sylvia Janisriwati, S.H., M.Hum.	1. Hukum Kepailitan 2. Hukum Perbankan
14	201040	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	Hukum Administrasi Negara
15	203015	Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.	1. Hukum Pidana 2. Kejahatan Ekonomi
16	196027	Dra. Anastasia Innurtrisniyati, M.S.i.	1. Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Etika Multikultural
17	207013	Marlina S.H., M.Hum.	Hukum Laut
18	215020	Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.	Kejahatan Siber
19	215014	Nabbilah Amir, S.H., M.H.	Hukum Tata Ruang
20	216003	Erly Aristo, S.H., M.Kn.	Hukum Agraria
21	217012	Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.	Hukum Internasional
22	217019	Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.	Hukum Keuangan Negara
23	218009	Utiyafina Mardhat iHazhin, S.H., M.H.	Hukum Asuransi
24	218010	Michelle Kristina, S.H., M.H.	Kejahatan Korporasi
25	218011	Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H.	Perlindungan Konsumen
26	218014	Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.	Kejahatan Ekonomi
27	218023	Fransisca Yanita Prawitasari, S.H., M.Kn.	Hukum Persekutuan
28	218058	Bebeto Ardyo, S.H., M.H.	Hukum Perikatan
29	218059	Igam Arya Wada, S.H., M.H.	Hukum Kependidikan dan Ormas
30	217034	H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.	1. Hukum Dagang 2. Negara Hukum dan Demokrasi

31	217036	Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.	1. Hukum Keuangan Negara 2. Pemerintahan Daerah
32	217025	Henry Soegeng, S.H., MBA.	Hukum Lingkungan
33	217035	H. Sudarsono, S.H., M.S.	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Waris Adat
34	220024	Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.	1. Hak Milik Intelektual 2. Hukum Islam
35	220014	Irti Windra Syahril, S.H., M.S.	1. Hak Milik Intelektual 2. Hukum Perdata
36	217055	Yusrambono, S.H., M.Si.	1. Hukum Pengangkutan 2. Hukum Asuransi
37	215133	Soetrisno, S.H., M.Hum.	1. Hukum Persekutuan 2. Hukum Adat
38	216055	Edy Hendrawan, S.H., M.H.	Hukum Jaminan
39	216077	Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum.	1. Kejahatan Korporasi 2. Hukum Acara Pidana

2. Dosen MKU / Tidak Tetap

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1.	209112	Drs. Ali Fauzi, M.Si.	- Agama Islam
2.	209115	Drs. Harimullah, M.Si.	- Agama Islam
3.	217120	Siti Zuraida, S.H., M.Hum.	- Agama Islam
4.	202046	M. Arbi Hidayat, S.Si., M.Si.	- Agama Islam
5.	212146	Ali Mahsun, M.Pd.I.	- Agama Islam
6.	214131	Mahsan, S.H., M.Pd.I.	- Agama Islam
7.	209102	Drs. Josep Sintar	- Agama Katolik
8.	210242	Drs. A.W. Susmono, M.MPd.	- Agama Katolik
9.	179016	Soetrisno, S.H., M.Hum.	- Agama Katolik
10.	209109	Thomas Bejo Utomo, S.Th., M.A.	- Agama Protestan
11.	213145	Yakop C.K. Saragih, S.Si.	- Agama Protestan
12.	213146	Pdt. Ponco Mujiono Basuki, S.Th., M.Mis.	- Agama Protestan
13.	209107	Tosin, S.H., M.H.	- Agama Budha
14.	209111	Irwan Pontoh, S.E., M.Psi.	- Agama Budha
15.	209114	Ida Bagus Kartika Dewi, S.E., M.Psi.	- Agama Budha
16.		Sujana, S.Pd.B.	- Agama Budha
17.	210243	Dra. Ni Wayan Suarmini, M.Sc.	- Agama Hindu
18.	211149	Ni Putu Swasti, S.E., S.Pd.H., M.Pd.H.	- Agama Hindu
19.	210250	Tan Djin Meng, S.T.	- Agama Khonghucu
20.	209113	Dr. Oesman Arif, M.Pd.	- Agama Khonghucu
21.	206701	Drs. Haryadi, M.Si.	- Etika Multikultural
22.	200606	Drs. Priyatmoko, M.A.	- Etika Multikultural
23.	186005	Dra. Edna Sri Redjeki	- Etika Multikultural
24.	212004	Paula Swandayani Hartanto, S.H., M.Kn.	- Etika Multikultural
25.	209008	Olly Wicaksono Pratamasari, S.E., M.MT.	- Etika Multikultural
26.	191001	Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
27.	217055	Yusrambono, S.H., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
28.	217055	Dr. Martono, S.H., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
29.	206702	Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
30.	212159	Dr. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
31.	217035	Sudarsono, S.H., M.S.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
32.	196027	Drs. Anastasia Innurtrisniyati, M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
33.	179008	Drs. ec. Noerjanto, M.M.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
34.	184008	Supriono, S.H., M.Hum.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
35.	209103	Dr. Heri Suharyanto	- Pancasila dan Kewarganegaraan
36.	212142	Nanang Haryono, S.IP., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
37.	210243	Dra. Ni Wayan Suarmini, M.Sc.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
38.	215100	Poernomowati, S.H., M.M., M.H.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
39.	217034	Heru Susanto, S.H., M.Hum.	- Pancasila dan Kewarganegaraan

3. Dosen Tidak Tetap

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1.	209134	Prof.Dr.Dr.Med.H.Soekri Erfan Kusuma	- Hukum Forensik
2.	212159	Hj.Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.	- Hukum Acara Pidana
			- Hukum Kepailitan
2.	215103	Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.	- Hukum Jaminan
			- Hukum Perbankan
3.	208701	Dr.Drs. Besin Gaspar, M.Pd.	- Bahasa Inggris
4.	215133	Soetrisno, S.H., M.Hum.	- Hukum Perubahan Sosial
			- Hukum Adat
6.	206014	Yenny Hartanto. S.E., M.Pd.	- Bahasa Inggris
7.	208234	Rusli Dewi, M.Pd.	- Bahasa Inggris
8.	217120	Siti Zuraida, S.H., M.Hum	- Hukum Islam

9. Penutup

Dengan pelaksanaan yang konsisten disertai dukungan yang tulus dari segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Insya Allah Kurikulum baru ini dapat membantu memperlancar realisasi visi, misi, dan tujuan Fakultas hukum sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam naskah Strategic Planning Fakultas Hukum Universitas Surabaya Surabaya2019-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Surabaya Nomor 498 Tahun 2019.